



Laporan Kinerja
**Biro Manajemen Kinerja,
Organisasi, dan Tata Kelola**
S.d. Triwulan II Tahun 2022

NOMOR : OT.04/LPP-56/SU01/2/2022
TANGGAL : 30 JUNI 2022



Laporan Kinerja
Biro Manajemen Kinerja,
Organisasi, dan Tata Kelola
s.d. Triwulan II Tahun 2022

NOMOR: OT.04/LPP-56/SU01/2/2022
TANGGAL: 30 JUNI 2022



Nomor : OT.04/LPP-56/SU01/2/2022
Hal : Laporan Kinerja Biro Manajemen Kinerja,
Organisasi dan Tata Kelola (MKOT)
s.d. Triwulan II Tahun 2022

30 Juni 2022

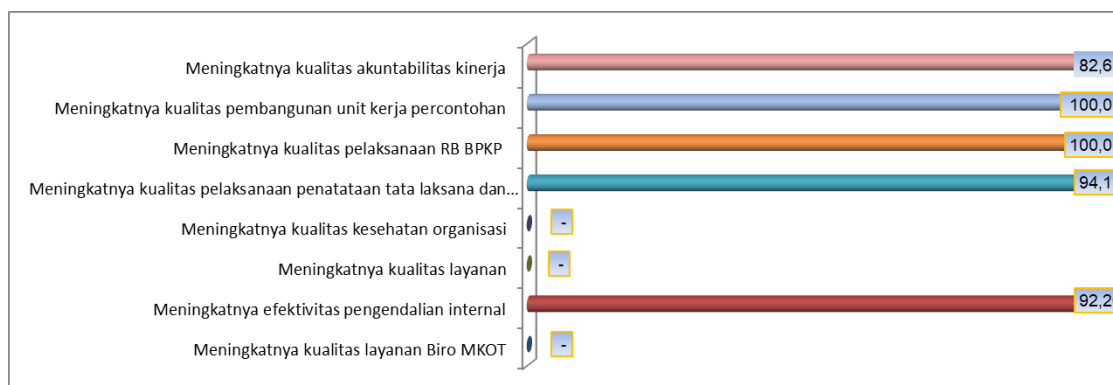
Yth.
Sekretaris Utama BPKP
di Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Kinerja Biro MKOT s.d. triwulan II tahun 2022 sebagai berikut:

A. Simpulan

Rerata capaian kinerja kegiatan Biro MKOT adalah sebesar 93,81%. Nilai tersebut merupakan rerata atas lima dari delapan sasaran kegiatan yang telah diukur pada Triwulan II Tahun 2022. Tiga sasaran kegiatan Biro MKOT yang lain akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2022. Dibandingkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2022, terjadi penurunan capaian kinerja, yaitu dari 97,74% menjadi 93,81%. Penurunan capaian kinerja ini disumbang oleh penurunan dua sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan meningkatnya aktivitas pengendalian internal. Rincian rerata capaian kinerja sasaran kegiatan Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Grafik 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.

Grafik 1
Rerata Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Biro MKOT
s.d. Triwulan II Tahun 2022



Selain 8 sasaran kegiatan di atas, terdapat satu tambahan sasaran kinerja terkait dengan Pengawasan dan Program STAR. Sasaran tersebut adalah tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi. Rata-rata capaian sasaran kegiatan tersebut adalah 100,00%, yaitu realisasi 2 dari target 2.

Tabel 1
Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022

No. Urut SK	No. Urut IKK	Kegiatan /Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d. TW II
				Tahun 2022	s.d. TW II		Tahun 2022	s.d. TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/6	
Kegiatan: Pembinaan dan koordinasi layanan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola									
1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja									
1.1		Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persen	100,00	40,00	20,00	20,00	50,00	82,65
1.2		Persentase Keselarasan <i>Cascading</i> Kinerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.3		Persentase Rencana Pelaksanaan Pengawasan yang Tepat Waktu	Persen	75,00	75,00	51,62	39,80	68,83	
1.4		Persentase <i>Output</i> Pengawasan yang Dihasilkan Tepat Waktu	Persen	75,00	75,00	60,44	36,90	80,59	
1.5		Persentase Ketercapaian Target <i>output</i>	Persen	100,00	100,00	96,47	96,47	96,47	
1.6		Persentase Laporan Kinerja Tepat Waktu	Persen	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan									
2.1		Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan WBK ke TPN	Unit Kerja	24	9	9	37,50	100,00	100,00
2.2		Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan WBBM ke TPN	Unit Kerja	3	1	1	33,33	100,00	
3 Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan RB BPKP									
3.1		Persentase Rencana Aksi RB Tahunan yang Terlaksana.	Persen	100,00	43,64	43,64	43,64	100,00	100,00
4 Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Tata Laksana dan Organisasi									
4.1		Nilai Efektivitas Struktur	Nilai	81	81	72,03	88,93	88,93	94,17
4.2		Nilai Efektivitas Proses	Nilai	81	81	80,52	99,41	99,41	
5 Sasaran Kegiatan 5: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Organisasi									
5.1		Persentase <i>area of improvement</i> yang selesai ditindaklanjuti	Persen	100	-	-	-	-	Belum diukur
6 Sasaran Kegiatan 6: Meningkatkan Kualitas Layanan									
6.1		Jumlah Unit yang Meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan BPKP	Jumlah	20	-	-	-	-	Belum diukur
6.2		Persentase Rekomendasi Perbaikan yang Ditindaklanjuti	Persen	85	-	-	-	-	
7 Sasaran Kegiatan 7: Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal									
7.1		Persentase Penyelesaian RTP (BPKP dan Unit Kerja)	Persen	100,00	51,03	19,47	19,47	38,15	92,26
7.2		Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (BPKP dan Unit Kerja)	Persen	65,00	65,00	95,14	146,37	146,37	
8 Sasaran Kegiatan 8: Meningkatkan Kualitas Layanan Biro MKOT									
8.1		Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT	Skala 10	8,16	-	-	-	-	Belum diukur

B. Kinerja Agenda Prioritas Dukungan Pengawasan (APDP)

Biro MKOT berhasil merealisasikan seluruh target APDP Triwulan II Tahun 2022. Capaian tersebut terdiri dari 5 tema, 7 topik, dan 9 butir hasil, dengan rincian target sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Rincian realisasi APDP disajikan pada Lampiran I.

Tabel 2
Target APDP Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022

NO.	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN	
				TW I	TW II
1	Manajemen Kinerja Pengawasan	Desain Manajemen Pengawasan Terintegrasi	Konvergensi seluruh segmen dan sektor APP 2022	√	
2			Keselaran antara sasaran strategis pada renja dengan APP (Pemetaan SK dan PKPT)	√	
3			Keselaran KAP dan PKPT dengan APP	√	
4			Kesesuaian komposisi penganggaran dengan rencana pengawasan (PKPT)	√	
5			Konsep Integrasi Data Manajemen Pengawasan	√	√
6		Perencanaan dan Penganggaran Pengawasan	Mekanisme revisi PKPT APP	√	
7			Pemetaan dan pemerataan beban kerja dan RMP	√	
8		Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Monitoring RPL dan RMP	√	√
9			Pemantauan sequencing hasil pengawasan kontributor dan sintesisnya	√	√
10			Mekanisme Sintesa Hasil Pengawasan Strategis	√	
11		Analisa dan Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Mekanisme pengusulan PKPT pengganti APP	√	
12			Ikhtisar Hasil Pengawasan	√	√
13	Manajemen SDM	Analisis Beban Kerja	Pemetaan beban kerja dan komposisi SDM	√	√
14	Tata Kelola Pengawasan	Proses Bisnis Pengawasan	Pendampingan Penyusunan Pedoman & SOP sintesa pengawasan	√	√
15	Pengendalian Internal	Pengawasan atas Tata Kelola	Penyusunan risiko pengawasan APP dan risiko dukungan pengawasan	√	
16			Pemantauan indikator risiko pengawasan APP	√	√
17			Mitigasi risiko pelaksanaan penugasan	√	√
18	Publikasi Hasil Pengawasan	Distribusi hasil pengawasan kepada stakeholders	Penyampaian hasil pengawasan tepat waktu	√	√

C. Uraian Capaian Kinerja

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 82,65%. Capaian kinerja Triwulan II menurun dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022 yang sebesar 92,17%. Capaian kinerja ini diukur dengan 5 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: 1) Persentase dokumen perencanaan tepat waktu, 2) Persentase keselarasan *cascading* kinerja, 3) Persentase pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu, 4) Persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu, 5) Persentase ketercapaian target *output*, dan 6) Persentase laporan kinerja tepat waktu. Uraian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu

Capaian kinerja kegiatan dengan indikator persentase dokumen perencanaan tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 50%, yaitu realisasi 20% dari target 40%. IKK persentase dokumen perencanaan tepat waktu diukur berdasarkan realisasi dokumen perencanaan yang diterbitkan. Dokumen perencanaan yang merupakan target kinerja Bagian Perencanaan yang harus diselesaikan secara tepat waktu 2022 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Timeline Penerbitan Dokumen Perencanaan

No.	Dokumen	Jumlah	Rencana Penerbitan
1	Perjanjian Kinerja	1 dokumen	Triwulan I
2	Rencana Kinerja	1 dokumen	Triwulan II
3	Kebijakan Pengawasan	1 dokumen	Triwulan IV
4	Kebijakan Teknis Pengawasan	1 dokumen	Triwulan IV
5	Rencana Kerja Tahunan	1 dokumen	Triwulan IV
Jumlah		5 dokumen	

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, sebanyak 1 dokumen berhasil diselesaikan atau 50% dari target 2 dokumen. Dokumen yang sudah terealisasi adalah Perjanjian Kinerja tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 belum dapat diterbitkan karena masih dalam tahap penetapan pagu indikatif. Penyelesaian Renja tahun 2023 dilakukan melalui koordinasi dengan Bappenas dan unit kerja BPKP, serta ditargetkan tuntas pada Triwulan III Tahun 2022.

2) Persentase Keselarasan *Cascading* Kinerja

Capaian kinerja kegiatan dengan indikator kinerja persentase keselarasan *cascading* kinerja pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 100,00%, yaitu realisasi 100,00% dari target 100,00%. IKK persentase keselarasan *cascading* kinerja diukur berdasarkan jumlah dokumen *cascading* kinerja yang tersusun dibandingkan dengan jumlah *cascading* kinerja yang seharusnya. Realisasi kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebanyak 6 dokumen *cascading* kinerja Eselon I telah selesai disusun atau tercapai 100% dari target s.d. Triwulan II Tahun 2022.

Sampai dengan triwulan II belum dilakukan perubahan atas *cascading* kinerja tahun 2022. Penyusunan *cascading* telah mengacu pada Pohon Kinerja BPKP, yang secara garis besar memiliki 6 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program yang

menjadi tanggung jawab masing-masing Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Utama, dengan Indikator Kinerja Program disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Cascading Kinerja Tahun 2022

No	Uraian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	3	12
2	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	12
3	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	3	9
4	Deputi Bidang Akuntan Negara	5	14
5	Deputi Bidang Investigasi	5	8
6	Sekretariat Utama	6	7

3) Persentase Rencana Pelaksanaan Pengawasan yang Tepat Waktu

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan indikator kinerja persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu s.d Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 68,83%, yaitu realisasi 51,62% dari target 75,00%. IKK persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu diukur dengan cara membandingkan realisasi PKPT yang terbit sesuai dengan rencana mulai penugasan (RMP) dengan target PKPT s.d. triwulan II. Target persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah 75,00%. Realisasi pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu s.d. triwulan II tahun 2022 adalah 51,62%, yaitu 1.324 dari 2.565 pengawasan. Rincian target, realisasi dan capaian pelaksanaan penugasan tepat waktu s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Target, Realisasi, dan Capaian Pelaksanaan Penugasan Tepat Waktu
s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Target PKPT 100%		Target RMP 75%		Realisasi	Capaian (%)	
		Setahun	s.d. TW II	Setahun	s.d. TW II		Setahun	s.d. TW II
1	Direktorat & Pusbin	702	425	527	319	253	48,05	79,37
2	Perwakilan	3.733	2.140	2.800	1.605	1.071	38,25	66,73
	Jumlah	4.435	2.565	3.326	1.924	1.324	39,80	68,82

Sumber Data: Monsima per 30 Juni 2022

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

- Melakukan pemantauan kesesuaian realisasi penugasan pengawasan dengan RMP dalam aplikasi SIMA.
- Mengingatkan dan melakukan konfirmasi ke unit kerja terkait PKPT yang telah jatuh tempo RMP-nya, namun belum terbit ST.
- Melakukan dialog kinerja dengan seluruh unit kerja

Rencana tindak untuk meningkatkan kinerja adalah:

- Memastikan kesiapan Rendal terkait pelaksanaan kinerja di awal triwulan III tahun 2022.

- b. Mengintensifkan frekuensi pemantauan unit kerja

4) Persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan indikator persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu s.d. triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 80,59%, yaitu realisasi 60,44% dari target 75%. IKK persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu diukur dengan membandingkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang terbit sesuai dengan rencana penerbitan laporan (RPL) dibagi dengan jumlah LHP terbit. Target IKK tersebut s.d. triwulan II tahun 2022 adalah 75,00%. Realisasi persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu s.d. triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 60,44%, yaitu realisasi 1.198 dari target 1.982. Rincian target, realisasi, dan capaian *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Target, Realisasi, dan Capaian *Output* Pengawasan yang Dihasilkan Tepat Waktu s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Target PKPT 100%		Target RPL 75%		Realisasi	Capaian (%)	
		Setahun	s.d. TW II	Setahun	s.d. TW II		Setahun	s.d. TW II
1	Direktorat & Pusbin	702	375	527	281	182	34,57	64,71
2	Perwakilan	3.733	1.607	2.800	1.205	1.016	36,29	84,30
	Jumlah	4.435	1.982	3.326	1.487	1.198	36,02	80,59

Sumber Data: Monsima per 30 Juni 2022

Upaya-upaya yang telah dilakukan s.d. triwulan II tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain:

- Melakukan pemantauan kesesuaian realisasi penerbitan *output* pengawasan dengan RPL dalam aplikasi SIMA.
- Mengingatkan dan melakukan konfirmasi ke unit kerja terkait PKPT yang sudah terbit ST namun belum terbit ST, maupun yang sudah RPL namun belum terbit ST dan atau laporannya.

5) Persentase Ketercapaian Target *Output*

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan indikator persentase ketercapaian target *output* s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 96,47%, yaitu realisasi 96,47% dari target 100,00%. Capaian ini jauh meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2022 yang sebesar 69,59%. IKK persentase ketercapaian target *output* merupakan perwujudan kemampuan BPKP dalam merealisasikan penugasan yang telah direncanakan dalam PKPT. IKK tersebut diukur dengan cara membandingkan antara realisasi laporan atas penugasan pengawasan dengan target *output* s.d. Triwulan II Tahun 2022. Rincian target, realisasi, dan capaian *output* BPKP s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Target, Realisasi, dan Capaian *Output* BPKP
s.d.Triwulan II Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	
		Setahun	s.d. TW II		Setahun	s.d. TW II
1	Direktorat & Pusbin	702	375	293	41,74	78,13
2	Perwakilan	3.733	1.607	1.619	43,37	100,75
	Jumlah	4.435	1.982	1.912	43,11	96,47

Sumber Data: Monsima per 30 Juni 2022

6) Persentase Laporan Kinerja Tepat Waktu

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan indikator persentase laporan kinerja tepat waktu s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah 100%, yaitu realisasi sebanyak 11 dari 11 laporan kinerja yang ditargetkan. Capaian tersebut merupakan 50% dari target tahun 2022 yang sebanyak 22 laporan. Indikator kinerja kegiatan persentase laporan kinerja tepat waktu diukur dengan jumlah realisasi *output* laporan kinerja dibandingkan dengan target *output* laporan kinerja yang disusun oleh Biro MKOT.

Upaya-upaya yang telah dilakukan s.d. Triwulan II Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja di atas adalah:

- a. Koordinasi dengan unit kerja dilaksanakan di awal rencana penyusunan laporan.
- b. Aktif mengingatkan agar meng-*entry* data secara tepat waktu.
- c. Bekerja sama dengan Pusinfowas dalam mengembangkan *dashboard* Monsima.
- d. Bekerja sama dengan Biro Keuangan dan Pusinfowas dalam mengintegrasikan data aplikasi BISMA dan SIMA

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan” adalah sebesar 100,00%, yaitu realisasi 100,00% dari target 100,00%. Sasaran ini diukur dengan menggunakan dua IKK yaitu:

1) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKK Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan WBK ke TPN adalah 100%, yaitu realisasi 9 dari target 9 unit kerja. Capaian IKK tersebut dihitung dari perbandingan jumlah unit kerja yang ditargetkan untuk diusulkan ke TPN dengan realisasi unit kerja yang diusulkan ke TPN. Jumlah unit kerja yang diusulkan ke TPN sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 9 unit kerja.

2) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKK Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan WBBM ke TPN adalah 100%, yaitu realisasi 1 dari target 1 unit kerja. Capaian IKK tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah unit kerja yang ditargetkan untuk diusulkan ke TPN dengan unit kerja yang diusulkan ke TPN. Jumlah unit kerja yang ditargetkan untuk diusulkan ke TPN sebanyak 1 unit kerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) di Lingkungan BPKP, berupa konsep Peraturan BPKP yang menyesuaikan regulasi terbaru (PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021) tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI di lingkungan K/L/P.
- b. Melakukan kegiatan analisis atas *self assessment* Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan analisis bukti pendukung ZI (WBK/WBBM) unit kerja.
- c. Melakukan kegiatan sosialisasi (*Library Cafe*), monitoring, dan evaluasi terhadap persiapan unit kerja dalam rangka menuju WBK/WBBM.
- d. Bagian SPIP dan RB menjadi narasumber dalam acara *workshop*/sosialisasi/PPM terkait Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilakukan oleh unit kerja.
- e. Melakukan pendampingan pada unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- f. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat BPKP sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dan KemenPAN dan RB sebagai Tim Penilai Nasional (TPN) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja sebagai komponen ZI menuju WBK/WBBM.

3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB BPKP

Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP pada Triwulan I Tahun 2022 adalah 100%, yaitu realisasi 43,64% dari target 43,64%. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB BPKP” memiliki satu IKK, yaitu “Persentase Rencana Aksi RB Tahunan yang Terlaksana”. Target IKK tersebut dihitung berdasarkan perbandingan jumlah realisasi rencana aksi RB BPKP dibandingkan dengan target. Target persentase rencana aksi RB tahunan yang terlaksana sebesar 43,64% merupakan 48 dari 110 renaksi dalam tahun 2022.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Inspektorat BPKP terkait rencana aksi RB BPKP.
- b. Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja RB guna memastikan implementasi RB BPKP berjalan dengan efektif.
- c. Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja kepada unit kerja dalam rangka mendorong implementasi RB.
- d. Pembentukan Agen Perubahan di setiap unit kerja BPKP dalam rangka menggerakkan unit kerja untuk melakukan perubahan sehingga dapat lebih efektif mempercepat implementasi RB.
- e. Mendorong pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, terutama unit kerja perwakilan, sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB BPKP secara menyeluruh.

4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penataan Tata Laksana dan Organisasi

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi adalah sebesar 94,17%. Sasaran kegiatan ini diukur dengan dua IKK, yaitu 1) nilai efektivitas struktur dan 2) nilai efektivitas proses, dengan uraian sebagai berikut:

1) Nilai Efektivitas Struktur

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan indikator kinerja nilai efektivitas struktur pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 88,93%, yaitu realisasi 72,03 dari target 81,00. IKK "Nilai Efektivitas Struktur" diukur dengan cara melakukan survai berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur organisasi. Realisasi IKK s.d. triwulan II tahun 2022 masih mengacu pada hasil tahun 2021.

Upaya-upaya yang telah dilakukan s.d. Triwulan II Tahun 2022 sekaligus penataan kelembagaan berkelanjutan paska terbitnya Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) antara lain sebagai berikut:

a. Pemantauan Perpindahan Jabatan Fungsionan (JF) Peneliti ke dalam JF Auditor di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Dalam rangka menindaklanjuti peralihan fungsi penelitian dan pengembangan BPKP ke dalam BRIN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 serta melaksanakan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP serta Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Koordinator, dan Subkoordinator di Lingkungan BPKP, telah dilakukan pembahasan progres pengalihan JF Peneliti ke JF Auditor di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP.

b. Finalisasi Draf Keputusan Kepala BPKP tentang Uraian Jabatan di Lingkungan BPKP

Menindaklanjuti Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, serta Surat Sekretaris Utama Nomor S-109/SU/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Rencana Aksi atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Penyetaraan JA ke dalam JF dan Penetapan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, perlu ditetapkan pengaturan yang berkaitan dengan uraian jabatan di lingkungan BPKP.

Progres penyusunan uraian jabatan di lingkungan BPKP s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Proses penyesuaian draf Keputusan Kepala BPKP tentang Uraian Jabatan dengan hasil *legislative drafting* oleh Biro Hukum dan Komunikasi telah selesai dilaksanakan.
- (2) Perbaikan atas uraian jabatan dengan memedomani masukan terkait uraian jabatan untuk jabatan koordinator PAEP di Kedeputusan dan jabatan untuk subkoordinator kepegawaian di perwakilan BPKP telah dilakukan.
- (3) Masukan dari Biro Umum terkait beberapa uraian jabatan yang ada di unit kerja tersebut karena terdapat beberapa uraian jabatan yang tidak sesuai dengan kondisi di Biro Umum masih dalam proses.

c. Pemantauan Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi di BPKP

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi (Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022) merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang tahapan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah. Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tersebut disusun sebagai *guideline* untuk seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengatur tentang penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja ini meliputi dua hal pokok, yaitu terkait dengan mekanisme kerja dan proses bisnis yang ada di masing-masing instansi pemerintah. BPKP selaku instansi pemerintah dalam bidang pengawasan intern juga termasuk dalam obyek peraturan baru ini.

Progres pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di BPKP s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Pengkajian Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan masih dalam tahap penyusunan hasil kajian.
- (2) Koordinasi dengan Biro SDM untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam memedomani peraturan tersebut.

d. Penyusunan Draft Perubahan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

Dalam rangka penataan organisasi, termasuk perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan riset dan Inovasi Nasional (BRIN), telah diselenggarakan kegiatan-kegiatan lanjutan untuk merubah Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- (1) Perumusan dan pembahasan penataan kelembagaan Puslitbangwas pasca terbitnya Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN.
- (2) Perumusan dan pembahasan naskah dinas akademik (*urgency*) dalam rangka penataan kelembagaan paska kebijakan pengalihan fungsi litbang di lingkungan BPKP.
- (3) Perumusan dan pembahasan rancangan Peraturan Presiden dalam rangka penataan kelembagaan paska kebijakan pengalihan fungsi penelitian dan pengembangan.

2) Nilai Efektivitas Proses

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan indikator kinerja nilai efektivitas proses adalah sebesar 99,41%, yaitu realisasi 80,52 dari target 81. Indikator kinerja kegiatan Nilai Efektivitas Proses diukur melalui survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner mencakup pertanyaan/pernyataan terkait indikator dimensi-dimensi proses organisasi.

Evaluasi kelembagaan dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh 53 responden yang mewakili Unit Kerja di lingkungan BPKP, yaitu Sekretariat Utama, Kedeputan, Inspektorat, Pusat-Pusat, dan seluruh Perwakilan.

Realisasi Nilai Efektivitas Proses Triwulan II Tahun 2022 sebesar 80,52 atau 99,41% dari target 81 tersebut mencapai 93,63% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 86. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi proses, organisasi

tergolong sangat efektif. Proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodasi kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

a. Pemantauan Pedoman Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP Tahun 2022

Biro MKOT mengembangkan modul aplikasi pemantauan atas *due process* penyusunan pedoman APP Tahun 2022 yang disusun oleh unit rendal di BPKP. Modul Pemantauan Pedoman APP dapat ditemukan pada Aplikasi E-TOP di Menu *Dashboard*. Pemantauan ini bertujuan agar unit rendal dapat menerbitkan pedoman secara tepat waktu dan mampu menghasilkan informasi minimal hasil pengawasan guna mensukseskan pelaksanaan APP BPKP Tahun 2022 dan penyusunan Laporan Presiden secara triwulanan.

b. Melaksanakan Penyusunan Kajian Evaluasi Pedoman Umum Penyusunan Pedoman

Dalam rangka mendukung jalannya APP, diperlukan suatu kebijakan berupa Pedoman Umum Penyusunan Pedoman yang menjadi acuan dalam menyusun pedoman pengawasan. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-1391/K/SU/2008 tentang Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan BPKP dan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-117/K/SU/2009 tentang Panduan Umum Pengelolaan Pedoman di Lingkungan BPKP dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan konvergensi pengawasan saat ini, dan Biro MKOT perlu melakukan pembaharuan terhadap kebijakan di atas agar selaras dengan APP BPKP.

Kebijakan baru yang akan disusun perlu didukung oleh kajian terhadap hal-hal yang perlu diatur dalam revisi kebijakan yang akan dilakukan. Pada Triwulan II Tahun 2022 ini, hasil analisis dari kuesioner terhadap KEP-1391/K/SU/2008 tentang Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan BPKP yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan BPKP perlu segera diperbaharui untuk dapat mendukung pelaksanaan penyusunan pedoman APP, melengkapi kajian yang sedang disusun. Pada bulan Juni 2022, Kajian Panduan Umum Penyusunan Pedoman telah disahkan oleh Kepala Biro MKOT dengan Nomor PE.06.03/LPP-53/SU01/2022 pada tanggal 16 Juni 2022. Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah menyusun draf peraturan badan tentang panduan umum penyusunan pedoman dan pengelolaan pedoman di lingkungan BPKP

c. Pelaksanaan Validasi KAK Pedoman

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Proses Bisnis BPKP, Biro MKOT melaksanakan validasi terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh unit kerja rendal penanggung jawab. Proses validasi KAK dilakukan untuk memastikan kesesuaian KAK dengan prinsip-prinsip penyusunan pedoman, kesesuaian dengan Prosedur Penyusunan Pedoman dan Proses Bisnis, serta kesesuaian dengan Format KAK Penyusunan Pedoman.

Pada Triwulan II Tahun 2022 ini, tidak hanya KAK yang divalidasi, namun juga terdapat beberapa pedoman dan petunjuk teknis yang divalidasi. Validasi KAK, pedoman, dan petunjuk teknis telah dilakukan. Validasi yang dilakukan menghasilkan 9 hasil validasi terhadap KAK dan 6 hasil validasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang diajukan oleh unit kerja rendal penanggung jawab melalui Aplikasi E-TOP. KAK dan petunjuk teknis pedoman yang sudah divalidasi adalah sebagai berikut:

1. KAK Penyusunan Pedoman Umum Pengawasan Penguatan Infrastruktur Jaringan Irigasi;
2. KAK Penyusunan Pedoman Umum Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Minum Tahun 2022;
3. KAK Penyusunan Pedoman Topik APP Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun) Tahun 2022;
4. KAK Penyusunan Pedoman Umum Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol;
5. KAK Penyusunan Pedoman Topik APP Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
6. KAK Penyusunan Pedoman Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
7. KAK Pedoman Bimtek MR Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada KPU;
8. KAK Pedoman Pengawasan atas Akuntabilitas Penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022;
9. KAK Penyusunan Pedoman Pengawasan Topik APP Penanganan Covid-19 - Perubahan Perilaku, Komunikasi Publik, dan Satu Data Bersatu Lawan Covid-19;
10. Petunjuk Teknis Evaluasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2021-2022 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Petunjuk Teknis Evaluasi Program Indonesia Pintar Tahun 2021-2022 Madrasah pada Kementerian Agama;
12. Petunjuk Teknis Evaluasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2022 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
14. Petunjuk Teknis Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan; dan
15. Petunjuk Teknis Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2021-2022

d. Pelaksanaan Validasi SOP

Validasi SOP dilaksanakan dengan tujuan agar kualitas SOP yang dihasilkan sesuai dengan standar dan meyakinkan langkah-langkah yang ada dalam SOP sudah disusun secara efektif dan efisien. Pada Triwulan II Tahun 2022, Biro MKOT telah melaksanakan validasi SOP sebanyak 18 SOP Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dan 1 SOP Bagian Perencanaan pada Biro MKOT. Hasil validasi dituangkan dalam kertas kerja validasi. Kertas kerja validasi tersebut dalam tahap rewiu oleh Koordinator Organisasi dan Tata Kelola.

SOP yang telah divalidasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. SOP Pengelolaan Database SIMA Investigasi
2. SOP Pengelolaan Database Hasil Pengawasan Keinvestigasian
3. SOP Telaah Laporan Hasil Pengawasan
4. SOP Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance* Hasil Pengawasan
5. SOP Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi
6. SOP Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi
7. SOP Konsultansi Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*)
8. SOP Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik
9. SOP Telaah Atas Surat Pengaduan Masyarakat
10. SOP Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi
11. SOP Pemberian Keterangan Ahli
12. SOP Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
13. SOP Audit Penyesuaian Harga
14. SOP Audit Klaim
15. SOP Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
16. SOP Audit Investigatif
17. SOP Sistem Informasi Manajemen Akuntabel (SIMA) Investigasi
18. SOP Pra Perencanaan Penugasan Bidang Investigasi
19. SOP Penggunaan Aplikasi Monev Proyek STAR AF

e. Koordinasi Digitalisasi Arsip

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD), ditetapkan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai AUBKD dan berlaku secara nasional. Sehubungan dengan hal itu, telah diadakan rapat koordinasi di lingkungan BPKP antara Biro MKOT, Pusinfowas, Biro Umum, Biro SDM, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengintegrasikan Aplikasi Srikandi dengan Aplikasi lain yang ada di lingkungan BPKP. Dalam rapat tersebut, disepakati penerapan *single sign on* yang akan diupayakan oleh ANRI dan KOMINFO, berupa integrasi data *user*, kepegawaian, dan jabatan di Lingkungan BPKP ke dalam Aplikasi Srikandi dari server LDAP lotus domino dan MAP BPKP, serta pengaturan kriteria naskah dinas dalam penerapan Aplikasi SRIKANDI di BPKP.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, sedang dilaksanakan sinkronisasi antara Aplikasi Sadewa dengan Aplikasi SRIKANDI dengan Biro Umum sebagai unit penanggungjawab untuk berkoordinasi dengan ANRI.

f. Penyempurnaan Peta Proses Bisnis

Dari hasil evaluasi atas Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP, perlu dilaksanakan perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis. Atas dasar hal tersebut, telah disusun konsep revisi atas Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP dan konsep Keputusan Sekretaris Utama tentang Peta Subproses, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi

pada Peta Proses Bisnis BPKP. Konsep revisi tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 dan sampai dengan saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Revisi yang diajukan diantaranya penambahan peta sub proses BPKP-17 Manajemen Pembelajaran Terintegrasi dan setiap sub proses mengukur keberhasilan indikator kinerja maupun indeks/nilai terkait.

Hasil validasi dari Pusinfowas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa penyesuaian pengaturan aplikasi pada aktivitas yang terdapat dalam CFM.
2. Beberapa nama aktivitas di dalam CFM menyertakan nama aplikasi. Pencantuman nama aplikasi dalam aktivitas sebaiknya dihindari agar perubahan dan inovasi pada proses bisnis lebih akomodatif.

Atas hasil validasi tersebut akan dilakukan penyesuaian Konsep Peraturan BPKP tentang Peta Proses Bisnis BPKP dan Keputusan Kepala BPKP tentang Peta Subproses, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi pada Peta Proses Bisnis BPKP sesuai dengan masukan yang disampaikan

g. Penerapan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPKP

Setelah terbitnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPKP, Biro MKOT menginisiasi daftar kode klasifikasi arsip yang disepakati bersama dengan Biro Umum selaku penanggungjawab kode klasifikasi arsip.

h. Program Identifikasi Arsip Vital

Biro MKOT melakukan identifikasi arsip vital di lingkungan Biro MKOT dengan didampingi oleh Biro Umum. Biro MKOT menyusun daftar arsip vital di lingkungan Biro MKOT. Daftar arsip vital tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Biro Umum dan ANRI apakah berpotensi menjadi arsip statis yang mempengaruhi kebijakan pengawasan BPKP.

5. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Organisasi

Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas kesehatan organisasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 belum dapat diketahui karena belum diukur. Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Organisasi" diukur dengan satu IKK, yaitu persentase *area of improvement* (Aoi) yang selesai ditindaklanjuti, dengan target 100%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dilakukan analisis untuk penyusunan *Area of Improvement* (Aoi) berdasarkan hasil survei tahun 2021 yang mencakup:

- 1) Analisis skor hasil survei atas skoring tiap dimensi dan indikatornya.
- 2) Analisis Faktor (CFA) dimensi yang paling berpengaruh pada kesehatan organisasi.
- 3) Analisis Kualitatif (*Orange software*) untuk melihat pola, kata paling banyak muncul, dan *networking*nya pada komentar terbuka.
- 4) Pencermatan teliti komentar terbuka dan mengambil beberapa komentar kunci.
- 5) Wawancara mendalam dengan *observer/informan* (mengonfirmasi skor dan komentar dengan kondisi yang sebenarnya di beberapa unit kerja)
- 6) *Focus Group Discussion* untuk mengonfirmasi kondisi dan membahas akar masalah dengan beberapa unit berkompeten.

Pada Triwulan II Tahun 2022, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Atas Aol yang telah disusun, dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan beberapa unit kerja yang berkompeten dan membidangi Aol tersebut serta menyusun rencana tindak lanjut.

Pada tanggal 17 Mei 2022, Sekretaris Utama BPKP menerbitkan nota dinas hal tindak lanjut area perbaikan Indeks Kesehatan Organisasi BPKP. Dalam nota dinas tersebut, beberapa hal yang menjadi rencana tindak untuk dilaksanakan antara lain:

- a. Membuat pemetaan pola hubungan antara Renstra - Renja - RKA K/L - Perkin dengan APP dan APPD
 - b. Memutakhirkan aplikasi manajemen risiko - *beWise*, yang dilengkapi dengan modul pelaporan kejadian risiko yang dapat diisi oleh setiap pegawai dan bersifat lintas unit kerja
 - c. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk menyusun kebijakan *Flexible Working Arrangement* (FWA) untuk lingkungan BPKP.
 - d. Menambah tema materi diklat manajerial, terutama dalam hal penyesuaian cara kerja di era transformasi digital, menyiasati gap antar generasi di kantor, pemberian apresiasi dan motivasi bagi pegawai.
 - e. Mengembangkan *employee assistant program* (EAP), yang dapat digunakan sebagai sarana konseling bagi pegawai di seluruh unit kerja.
 - f. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi talenta seluruh pegawai (terutama pegawai yang berada di bawah box 7) melalui *individual development program* (IDP)
 - g. Menambah fitur 'isian preferensi minat kompetensi pegawai' di modul manajemen talenta
 - h. Memodifikasi fitur 'Dialog Kinerja' di modul SKP agar dapat di-*trigger* oleh pegawai (bawahan) yang memerlukan dialog kepada atasan
 - i. Mengintegrasikan modul SKP dengan aktivitas harian dan pemberian bintang pegawai yang ada di MAP.
- 2) Pemantauan tindak lanjut Aol
Setelah diterbitkannya nota dinas Sesma tersebut di atas, Biro MKOT melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unit kerja yang terkait rencana tindak lanjut tersebut. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, Biro MKOT dan Biro SDM sedang membahas strategi atas 9 rencana tindak tersebut.

6. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan

Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan s.d. Triwulan II Tahun 2022 belum dapat diketahui karena hasil capaian baru dapat dipantau pada Triwulan III Tahun 2022 berdasarkan hasil survei pelayanan publik yang dilakukan Inspektorat BPKP. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan” memiliki dua Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu 1) jumlah unit yang meningkat indeks kepuasan layanan BPKP dan 2) persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti, dengan uraian sebagai berikut:

1) Jumlah Unit yang Meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan BPKP

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKK Jumlah unit yang meningkat indeks kepuasan layanan BPKP s.d. Triwulan II Tahun 2022 belum dapat diketahui karena Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) belum diukur. Capaian IKK tersebut dihitung dengan membandingkan target jumlah unit kerja yang mendapatkan skor IPKP di atas 14,00 dengan realisasi unit kerja yang mendapatkan skor tersebut. Target jumlah unit kerja yang mendapatkan skor IPKP di atas 14,00 tahun 2022 adalah sebanyak 20 unit kerja. Skor tersebut diperoleh dari hasil survei pelayanan publik yang dilakukan Inspektorat BPKP pada akhir Triwulan II Tahun 2022 dan hasilnya baru dapat diketahui pada Triwulan III Tahun 2022.

2) Persentase Rekomendasi Perbaikan yang Ditindaklanjuti

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKK Persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan II Tahun 2022 belum dapat diketahui. Capaian kinerja dengan IKK tersebut dihitung dengan membandingkan target jumlah *Area of Improvement* (Aol) yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan total Aol yang dihasilkan dari survei IPKP. Aol tersebut diperoleh dari hasil survei IPKP yang dilakukan Inspektorat BPKP baru dapat diketahui pada Triwulan III Tahun 2022. Rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti baru dapat dipantau pada Triwulan IV Tahun 2022.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja, sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik,
- b. Mendampingi Pusdiklatwas pada Penilaian Indeks Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kemenpan-RB,
- c. Mendampingi unit kerja dalam penentuan *customer list survey* persepsi pelayanan publik,
- d. Berkoordinasi dengan Inspektorat BPKP terkait dengan survei IPKP.

7. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern.

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 92,26%. Capaian kinerja ini turun bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 yang sebesar 104,63%. Sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengendalian internal” memiliki dua IKK, yaitu:

1) Persentase Penyelesaian RTP (BPKP dan Unit Kerja)

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKK Persentase penyelesaian RTP (BPKP dan Unit kerja) s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 38,15%, yaitu

realisasi 19,47% dari target 51,03%. Capaian kinerja dengan IKK tersebut dihitung dari perbandingan persentase RTP yang terealisasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 (19,47%) dengan persentase RTP yang terjadwal s.d. Triwulan II tahun 2022 (51,03%). Persentase RTP yang terealisasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebesar 19,47% dihitung dari jumlah RTP terealisasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 66 dibandingkan dengan jumlah RTP tahun 2022 sebanyak 339. Persentase RTP yang terjadwal s.d. Triwulan II tahun 2022 sebesar 51,03% dihitung dari jumlah RTP yang terjadwal s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 173 dibandingkan dengan jumlah RTP tahun 2022 sebanyak 339.

2) Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (BPKP dan Unit Kerja)

Capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKK Persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan Unit kerja) s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 146,37%, yaitu realisasi 95,14% dari target 65,00%. Capaian kinerja dengan IKK tersebut dihitung dari perbandingan persentase jumlah risiko yang termitigasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan persentase jumlah risiko yang teridentifikasi s.d. Triwulan II Tahun 2022. Persentase jumlah risiko yang termitigasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebesar 95,14% dihitung dari perbandingan jumlah risiko yang termitigasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 2.543 dengan jumlah risiko yang teridentifikasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 2.673. Target persentase jumlah risiko yang teridentifikasi termitigasi s.d. Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 65,00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengembangan/perbaikan terus-menerus aplikasi manajemen risiko (*BeWise*) dengan menggali masukan dari unit kerja.
- b. Melakukan sosialisasi kebijakan Manajemen Risiko untuk tahun 2022 kepada seluruh unit kerja.
- c. Melakukan pemantauan atas realisasi RTP yang disusun oleh unit kerja.

Rencana tindak untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong seluruh unit kerja dan para pegawai untuk berani dan peduli dalam mencatat kejadian risiko pada aplikasi *BeWise*. Teknik penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pesan pada aplikasi MAP atau layar informasi di pintu masuk kantor. Hal ini penting guna mengetahui apakah pengendalian telah memadai.
- b. Meyelenggarakan bimbingan kepada para pengelola dan agen risiko untuk meningkatkan kompetensi manajemen risiko melalui pelatihan yang bekerja sama dengan Pusdiklatwas.
- c. Memantau perkembangan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan unit kerja.
- d. Berkoordinasi dengan Inspektorat BPKP terkait dengan penyesuaian pedoman rewiu Inpektorat BPKP tentang penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan unit kerja BPKP.
- e. Mengintegrasikan bukti pemenuhan (dokumentasi) Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, SPIP, dan model penilaian lainnya dengan data risiko dan Rencana Tindak Pengendalian. Hal ini merupakan terobosan (inovasi) guna efisiensi proses pendokumentasian pelaksanaan kegiatan.

8. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Biro MKOT

Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan Biro MKOT pada Triwulan II Tahun 2022 belum diukur. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro MKOT” memiliki satu IKK, yaitu “Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT”. Indikator kinerja ini diukur dengan metode persepsi melalui kuesioner yang disebarakan kepada para responden yang berhubungan langsung dengan layanan maupun yang terdampak. Penilaian indeks kualitas layanan Biro MKOT tahun 2022 akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022.

D. Output Kegiatan

Output kegiatan Biro MKOT pada Triwulan II Tahun 2022 tercapai sebesar 100%, yaitu realisasi 100,00% dari target 100,00%. Rincian capaian output kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Capaian Output Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Rincian Output (RO)	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			Tahun 2022	s.d. TW II		Tahun 2022	s.d. TW II
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100	100
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	1	100	100
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	1	100	100
4	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	1	1	1	100	100
5	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	100	100
Jumlah						100	100

Capaian kinerja *output* kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1) Layanan Perkantoran Biro MKOT

Output layanan perkantoran dicapai melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

2) Layanan Perencanaan

Output layanan perencanaan dicapai melalui beberapa kegiatan, seperti rapat koordinasi, pembahasan, maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dengan unit-unit kerja, yang menghasilkan dokumen perencanaan, yaitu dokumen Perkin tahun 2022 dan Renja sementara tahun 2023 (hingga tahapan penetapan pagu indikatif).

3) Layanan Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi

Output layanan pemantauan dan pelaporan kinerja organisasi dicapai melalui beberapa kegiatan yang menghasilkan sebelas laporan dari target 22 laporan kinerja tahun 2022, dengan realisasi laporan sebagai berikut:

- LKj Sekretariat Utama Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022 (2 laporan);
- LKj BPKP Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022 (2 laporan);
- Laporan Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP39/2006 BPKP Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022 (2 laporan);
- LKj Biro MKOT Triwulan I dan II Tahun 2022 (2 laporan);
- Laporan pemantauan Sintesis Hasil Pengawasan TW I dan TW II Tahun 2022 (2 laporan); dan
- Validasi Data Dashboard *Outcome* e-SAKIP s.d. TW I Tahun 2022 (1 laporan).

4) Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana

Output satu layanan penataan organisasi dan tata laksana menghasilkan 51 rincian *output*, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penataan dan Evaluasi Organisasi, Analisis dan Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja dengan realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 18 dokumen.
- b. Kegiatan Penataan dan Evaluasi Proses Bisnis dan Prosedur Kerja dengan realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 33 dokumen.

5) Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi

Output Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi dicapai dengan 4 kegiatan dari total 11 *output* kegiatan. Rincian *output* kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Rincian *Output* Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK) (RKA/DIPA)	Satuan	Target 2022	Realisasi <i>Output</i> s.d. Tw II	Capaian (%)
1.	Koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	1	-	0,00%
2.	Manajemen risiko	Dokumen	2	2	100,00%
3.	Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	3	100,00%
4.	Pembinaan APIP di lingkungan BPKP	Dokumen	3	1	33,33%
5.	Pengembangan budaya organisasi	Dokumen	2	1	50,00%

Uraian masing-masing indikator *output* kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Pemantauan Penyelenggaraan SPIP

Output kegiatan koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP direncanakan terlaksana pada Triwulan III Tahun 2022.

2) Manajemen Risiko

Realisasi *output* kegiatan manajemen risiko adalah sebanyak dua dokumen, yaitu:

- a. Laporan Pemantauan Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
- b. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Sekretariat Utama BPKP Triwulan I Tahun 2022

Tingginya capaian *output* sebesar 100% karena urgensi kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mempersiapkan penilaian mandiri maturitas SPIP BPKP tahun 2022, termasuk Manajemen Risiko Indeks.

3) Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

Output kegiatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB terealisasi sebanyak tiga dokumen, yaitu:

- a. Laporan Pemantauan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju WBK dan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Laporan Pemantauan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju WBK dan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Laporan Pemantauan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju WBK dan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara;

Tingginya capaian *output* kegiatan sebesar 100% karena diperlukan akselerasi pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2022.

4) Pembinaan APIP di Lingkungan BPKP

Output kegiatan pembinaan APIP di lingkungan BPKP pada Triwulan I Tahun 2022 terealisasi sebanyak satu dokumen, yaitu Laporan Analisis Pendahuluan Penilaian Mandiri atas Kapabilitas APIP di Lingkungan BPKP Tahun 2021. Capaian *output* kegiatan pembinaan APIP di Lingkungan BPKP hanya mencapai sebesar 33,33% karena *output* kegiatan pembinaan APIP di lingkungan BPKP direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022, sehingga realisasi 1 dari target 3.

5) Pengembangan Budaya Organisasi

Output kegiatan pengembangan budaya organisasi pada Triwulan II Tahun 2022 terealisasi sebanyak satu dokumen, yaitu Laporan Penyempurnaan Draft Peraturan BPKP tentang Budaya Kerja. Capaian *output* kegiatan pengembangan budaya organisasi adalah sebesar 50,00%, yaitu realisasi 1 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan pada tahun 2022. Kegiatan Pengembangan Budaya Organisasi direncanakan dilakukan pada Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2022.

E. Kinerja Lainnya

Biro MKOT juga menghasilkan kinerja lain sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan kebijakan nasional pengawasan intern dan pengembangan metodologi pengawasan

Kegiatan koordinasi perencanaan kebijakan nasional pengawasan intern dan pengembangan metodologi pengawasan memiliki satu sasaran kegiatan, yaitu tersedianya kebijakan nasional pengawasan intern dan pengembangan metodologi pengawasan. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan tersedianya kebijakan nasional pengawasan intern dan pengembangan metodologi pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 50%. Sasaran kegiatan tersebut memiliki dua IKK, yaitu 1) tersedianya dokumen kebijakan nasional pengawasan intern; dan 2) tersedianya metodologi pengawasan. Capaian masing-masing IKK tersebut pada tahun 2022 adalah masing-masing nihil dan 100%. Uraian masing-masing IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya Dokumen Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pengawasan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024, BPKP menetapkan kebijakan nasional pengawasan Intern sebagai acuan pelaksanaan kolaborasi kegiatan pengawasan di lingkungan BPKP dan APIP setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, BPKP telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022 “Tangguh Mengawasi, Pulihkan Negeri” yang terdiri dari 7 (tujuh) sektor, 29 (dua puluh sembilan) tema, dan 101 (seratus satu) topik. Selain itu, BPKP menerbitkan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2022 “Mengawal Langkah, Membangun Daerah” yang terdiri dari 8 (delapan) sektor dan 66 (enam puluh enam) tema yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi. BPKP juga telah menyusun dan menetapkan Agenda Prioritas Dukungan Pengawasan (APDP) sebagai kebijakan pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan (*enablers* BPKP) yang mempunyai peran strategis dalam memampukan BPKP untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan Tahun 2023, akan disusun kebijakan pengawasan BPKP yang terdiri dari:

- a. Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang merupakan rancangan strategis *product delivery*, sebagai rujukan untuk menghasilkan produk pengawasan.
- b. Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang merupakan APP lingkup daerah dengan memperhatikan karakteristik dan potensi daerah.
- c. Agenda Prioritas Dukungan Pengawasan (APDP) yang merupakan rancangan strategis untuk mendukung dan memastikan keberhasilan APP dan APPD.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, belum disusun kebijakan pengawasan tahun 2023 karena masih menunggu diterbitkannya Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Nota Keuangan, Pidato Kenegaraan, dan lain-lain. Selain itu, untuk menentukan fokus pengawasan yang menyesuaikan dengan kebutuhan *stakeholders*, khususnya Presiden, BPKP perlu mempertimbangkan capaian APP dan APPD Tahun 2022 agar menghasilkan *storyline* yang sistematis dan isu-isu strategis yang akan dilakukan pada tahun 2023 guna memberikan rekomendasi strategis dalam pengambilan keputusan/kebijakan pada level nasional maupun daerah.

BPKP berencana akan menyusun *Agenda Setting* Kebijakan Nasional Pengawasan Intern (Jaknaswasin) yang akan diterapkan seluruh APIP Nasional. Jaknaswasin adalah salah satu alat untuk mengorkestrasi APIP K/L/P dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPKP telah melaksanakan kegiatan forum kolaborasi orkestrasi APIP melalui Jaknaswasin bersama APIP beberapa K/L untuk membahas perumusan kebijakan, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN RB serta APIP K/L/P sebagai pelaksana atas jaknaswasin yaitu Inspektorat pada Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, Biro MKOT sedang menyusun draft kebijakan tentang orkestrasi APIP melalui Jaknaswasin yang berisi tentang perencanaan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan supervisi, serta monitoring dan pelaporan atas jaknaswasin.

2) Tersedianya metodologi pengawasan

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja BPKP, diperlukan metodologi pengawasan yang handal. Untuk itu, Biro Manajemen Kinerja melakukan Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan yang melibatkan Direktorat Perencanaan (PAEP) maupun Unit Randal Kedeputan. Selain itu, akan dilaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri (*STAR Additional Financing*). Metodologi pengawasan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan guna mencapai tujuan organisasi serta memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholders*, khususnya *stakeholder* utama yaitu Presiden RI.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, Biro MKOT melakukan koordinasi dengan pihak eksternal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyusun perencanaan dan penganggaran tahun 2022 untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan kinerja BPKP, Biro MKOT berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu:
 - a. Kementerian PPN/Bappenas.
 - b. Kementerian Keuangan RIKoordinasi tersebut berupa pembahasan *trilateral meeting* perubahan renja tahun 2022 dan pembahasan tindak lanjutnya.
2. Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 atas pagu indikatif dan koordinasi permohonan tambahan anggaran atas pagu indikatif tahun 2023 untuk memenuhi hasil pengawasan dan meningkatkan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* BPKP, Biro MKOT berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu:
 - a. Komisi XI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat
 - b. Kementerian PPN/Bappenas
 - c. Kementerian Keuangan RI
3. Dalam rangka pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2022 dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, BPKP melakukan pengawasan di tingkat nasional dan daerah dengan beberapa fokus antara lain pengawasan pada sektor Reformasi Pembangunan SDM, Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas, Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, Pemulihan Ekonomi, Ketahanan Pangan, Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim. Pengajuan ABT berdasarkan perintah Presiden (Inpres), perintah Menteri, Hasil Rapat Terbatas, Hasil Rapat Kabinet, dll yang bersifat strategis dan mendesak. Biro MKOT berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu:
 - a. Kementerian PPN/Bappenas.
 - b. Kementerian Keuangan - DJA
 - c. Kementerian Keuangan – BUN

Dalam hal pengembangan metodologi pengawasan, BPKP mempunyai proyek-proyek yang dibiayai oleh *STAR-Additional Financing*. Sekretaris Utama BPKP bertindak selaku *Executing Agency* dan penanggung jawab STAR-AF sedang Kepala Biro MKOT sebagai Ketua PMU. STAR-AF mempunyai *ultimate outcome* sebagai berikut:

1. Opini WTP untuk K/L/P
2. Level 3 Maturitas SPIP K/L/P

3. Level 3 Kapabilitas APIP K/L/P

Kegiatan yang dilakukan di Biro MKOT dengan merujuk pada anggaran STAR-AF yang ada dalam RKA K/L adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Teknologi Pengawasan melalui pengadaan IT *Equipment* untuk APIP dan PKN.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan tata kelola keuangan instansi serta meningkatkan keamanan data-datanya. Untuk memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BPKP berkoordinasi dengan pihak eksternal yang terkait, yaitu Kementerian Perindustrian, LKPP, dan ADB. Dalam pengadaan laptop/PC tersebut, BPKP telah menyusun kajian tentang analisis kebutuhan laptop agar pengadaan laptop menyesuaikan dengan klasifikasi dan *scope of work* APIP dan PKN serta mempertimbangkan TKDN sesuai Inpres tersebut.

2. Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Instiusional berdasarkan Pendekatan *e-Learning* melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan Talenta Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan aplikasi ITMS. Aplikasi ITMS bertujuan untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis manajemen karir, manajemen talenta dan manajemen kinerja dapat berfungsi optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai kinerja dan tujuan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, telah disusun SOP dan *User Request Proposal* (URP) aplikasi penetapan Diklat. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan implementasi ITMS, akan dilakukan *recruitment* konsultan IT serta penguatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan.

3. Penguatan Institusi melalui Pengembangan Sistem dan Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi beserta Sistem Informasinya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. Kegiatan/tema yang dilakukan oleh BPKP adalah menetapkan peraturan presiden mengenai kebijakan dan manajemen risiko di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan membentuk sistem manajemen risiko. Selain itu, penyusunan peraturan presiden tentang manajemen risiko diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPKP telah menerbitkan surat untuk melakukan koordinasi dengan K/L yang berkompeten yang akan menjadi anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Perpres MR.

Kegiatan lain adalah pengembangan aplikasi MR Terintegrasi. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, BPKP telah melaksanakan piloting, yaitu alpha dan beta. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Tata

Kelola Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan SPIP Terintegrasi.

4. Dukungan Pengelolaan Proyek STAR.

Dalam rangka mengawal keberhasilan proyek STAR AF – 3872 INO, *Project Manajement Unit* (PMU) berkolaborasi dengan *Project Manajement Consultant* (PMC) melakukan dukungan pengelolaan proyek STAR, baik yang bersifat administratif maupun substantif serta berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan (*Project Implementation Unit/PIU*). Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek, PMU dan PMC mengembangkan aplikasi *Project Performance Monitoring System* (PPMS). Aplikasi tersebut dibangun sebagai media komunikasi data antara PMU-PMC, PIU, serta pihak eksternal (ADB) untuk menjaga kualitas agar tetap sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam *loan agreement*, DMF, serta hal-hal yang strategis untuk mencapai keberhasilan dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. PPMS juga digunakan sebagai alat monitoring dan pelaporan secara *real time* dan *dashboard* pimpinan yang memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan/kebijakan strategis proyek.

BPKP juga telah melakukan penguatan *grand design* STAR AF dan inovasi-inovasi strategis agar setiap anggaran yang terealisasi jelas manfaat dan hasilnya. Sebagai tindak lanjut atas *grand design* tersebut, PMU dan PMC sedang melakukan kajian tentang kebutuhan transformasi digital pada setiap daerah melalui *smart workshop* sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dengan APiP Pemerintah Daerah, meningkatkan kompetensi APiP melalui pendidikan dan pelatihan, serta *coaching clinic* pemerintah daerah dan APiP lainnya.

Capaian *output* kegiatan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% dan kegiatan STAR masih nihil. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersedianya kebijakan nasional pengawasan intern dan pengembangan metodologi pengawasan, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan di atas. Capaian output kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022 pada Biro MKOT disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Capaian *Output* Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2022 pada Biro MKOT

No.	Rincian Output (RO)	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			Tahun 2022	s.d. TW II		Tahun 2022	s.d. TW II
	Hasil Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	Kegiatan	4	2	2	50	100
	Sub Jumlah Pengawasan		4	2	2	50	100
1	Hasil Peningkatan Sarana Teknologi Pengawasan	Unit	3.354	-	-	-	-
2	Hasil Kompetensi dan Kebutuhan Instiusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	Laporan	1	-	-	-	-
3	Hasil Dukungan Pengelolaan Proyek STAR	Laporan	1	-	-	-	-
4	Hasil Penguatan Institusi melalui Pengembangan Sistem	Laporan	2	-	-	-	-
	Sub Jumlah STAR					-	-
	Jumlah						

Jumlah Hasil Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan selama tahun 2022 ditargetkan 4 kegiatan yang melibatkan direktorat PAEP dan unit rendal kedeputian. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, kegiatan koordinasi PAEP

ditargetkan sebanyak 2 kegiatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, realisasi *output* sejumlah dua kegiatan koordinasi yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi pada triwulan I adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran BPKP Tahun 2022 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
 - b. Koordinasi tentang *baseline* anggaran BPKP Tahun 2023 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
 - c. Penyusunan Desain Manajemen Kinerja Pengawasan.
 - d. Penyusunan Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Kegiatan Koordinasi pada triwulan II adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi atas pagu indikatif dan rencana anggaran belanja tambahan tahun 2023.
 - b. Koordinasi atas usulan anggaran belanja tambahan tahun 2022.
 - c. Penyusunan *cascading* kinerja organisasi yang akan diselaraskan dengan sasaran kinerja individu.
 - d. Penyusunan dan pembahasan desain orkestrasi APIP melalui Jaknaswasin dan forum kolaborasinya bersama K/L/P yang berkompeten.

Hambatan dan Rencana Aksi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Pengawasan tahun 2023 belum dapat dilakukan s.d. triwulan II karena masih menunggu RKP diterbitkan, Nota Keuangan, dan isu strategis tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pengawasan akan dilaksanakan mulai Triwulan III Tahun 2022. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pengawasan tahun 2023 masih berdasarkan APP Tahun 2022 dan disesuaikan dengan isu yang ada pada saat ini, misalnya pengawasan TKDN, IKN, dan lain-lain.
2. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Sementara itu, *Loan Agreement* dan *Project Administration Manual* (PAM) STAR AF mengatur bahwa tidak ada preferensi dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai Loan ADB. Untuk dapat melanjutkan paket-paket pengadaan barang/jasa pada proyek STAR AF, diperlukan kajian serta masukan dari kementerian/lembaga terkait sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan. PMU dan PMC akan melakukan pemutakhiran analisis spesifikasi laptop yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup kerja APIP dan PKN agar tepat sasaran, serta melakukan konsultasi intensif dengan Kementerian Perindustrian dan LKPP sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam pengambilan keputusan.
3. Dengan berlakunya Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021, seluruh pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda, termasuk pengadaan yang didanai STAR AF, diselenggarakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Sebelumnya, pengadaan dapat diselenggarakan secara langsung oleh Pokja Pemilihan masing-masing unit kerja. Perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya rantai koordinasi proses pengadaan barang/jasa. PMU dan PMC memfasilitasi penyelarasan SOP pengadaan di Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selaku UKPBJ BPKP dengan prosedur pengadaan sesuai ADB's

procurement guidelines. Selain itu, PMU juga perlu menguatkan fungsi dashboard progress pengadaan sebagai alat monitoring bersama.

4. Proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) terlambat dari *timeline* yang telah disusun dan terdapat risiko pengesahan peraturan presiden tersebut melewati tahun anggaran 2022. Keterlambatann ini terjadi karena salah satu prasyarat penyusunan, yaitu Panitia Antar Kementerian (PAK), belum terbentuk. Pada saat ini, *draft* surat permintaan nama PAK Penyusunan Peraturan Presiden tentang MRPN yang ditujukan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga masih dalam proses reviu pimpinan BPKP.
5. Pemutakhiran draf kerangka kerja penguatan *grand design* STAR AF dan penyiapan bahan materi untuk dibahas dengan ADB pada saat *Mid-Term Review* pada 29 Juni – 19 Juli 2022.

F. Penggunaan Dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Penggunaan Dana

Capaian penggunaan dana pada Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.756.161.086,00 atau 81,76% dari anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2022 yang sebesar Rp8.263.218.995. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi anggaran rutin/reguler sebesar Rp874.670.641,00; realisasi anggaran pengawasan sebesar Rp540.718.218,00; dan realisasi dana STAR sebesar Rp5.340.772.227,00. Rincian penggunaan dana pada Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Penggunaan Dana pada Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Anggaran s.d. TW II	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
					Tahun 2022	s.d. TW II
A	Kegiatan Rutin					
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	398.974.000	199.487.000	256.877.816	64,38	128,77
2	Layanan Perkantoran	100.000.000	47.592.000	18.824.128	18,82	39,55
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	940.500.000	446.117.000	130.088.541	13,83	29,16
4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	484.500.000	300.146.828	300.146.828	61,95	100,00
5	Layanan Reformasi Kinerja	399.016.000	199.508.000	168.733.328	42,29	84,57
	Sub Jumlah Rutin	2.322.990.000	1.192.850.828	874.670.641	37,65	73,33
B	Kegiatan Pengawasan dan STAR					
	Hasil Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	1.048.367.000	648.367.000	540.718.218	51,58	83,40
	Sub Jumlah Pengawasan	1.048.367.000	648.367.000	540.718.218	51,58	83,40
1	Hasil Peningkatan Sarana Teknologi Pengawasan	46.966.177.000	-	-	-	-
2	Hasil Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Institusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	6.999.450.000	291.643.750	121.151.949	1,73	41,54
3	Hasil Dukungan Pengelolaan Proyek STAR	13.725.969.000	5.719.153.750	4.950.629.082	36,07	86,56
4	Hasil Penguatan Institusi melalui Pengembangan Sistem	2.467.222.000	411.203.667	268.991.196	10,90	65,42
	Sub Jumlah STAR	70.158.818.000	6.422.001.167	5.340.772.227	7,61	83,16
	Sub Jumlah Pengawasan dan STAR	71.207.185.000	7.070.368.167	5.881.490.445	8,26	83,19
	Jumlah	73.530.175.000	8.263.218.995	6.756.161.086	9,19	81,76

2. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian penggunaan SDM pada Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 99,02%, yang terdiri dari capaian kegiatan rutin Biro MKOT sebesar 106,58%, kegiatan pengawasan Biro MKOT sebesar 103,40%, dan kegiatan STAR sebesar 81,04%. Realisasi penggunaan SDM pada Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 15.598 OH atau 99,02% dari target sebesar 15.752 OH. Rincian penggunaan SDM pada Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Penggunaan SDM pada Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Rincian Output (RO)	Target		Realisasi (OH)	Capaian (%)	
		Tahun 2022	s.d. TW II		Tahun 2022	s.d. TW II
A	Kegiatan Rutin					
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.840	1.920	3.103	80,81	161,61
2	Layanan Perkantoran	-	-	-	-	-
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.503	2.399	2.399	53,28	100,00
4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.977	3.086	3.086	62,01	100,00
5	Layanan Reformasi Kinerja	5.100	3.248	2.766	54,24	85,16
	Sub Jumlah Rutin	18.420	10.653	11.354	61,64	106,58
B	Kegiatan Pengawasan dan STAR					
	Hasil Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	1.320	500	517	39,17	103,40
	Sub Jumlah Pengawasan	1.320	500	517	39,17	103,40
1	Hasil Peningkatan Sarana Teknologi Pengawasan	-	-	-	-	-
2	Hasil Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Institusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	558	279	288	51,61	103,23
3	Hasil Dukungan Pengelolaan Proyek STAR	8.160	4.080	3.260	39,95	79,90
4	Hasil Penguatan Institusi melalui Pengembangan Sistem	480	240	179	37,29	74,58
	Sub Jumlah STAR	9.198	4.599	3.727	40,52	81,04
	Sub Jumlah Pengawasan dan STAR	10.518	5.099	4.244	40,35	83,23
	Jumlah	28.938	15.752	15.598	53,90	99,02

3. Efisiensi Penggunaan Dana dan SDM

a. Efisiensi Penggunaan Dana dan SDM atas Kegiatan Rutin

Penggunaan dana atas kegiatan rutin telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran kegiatan Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 yang rerata sebesar 93,81% didukung oleh penggunaan dana sebesar 73,33%.

Penggunaan SDM atas kegiatan rutin belum efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran kegiatan Biro MKOT s.d. Triwulan II Tahun 2022 yang rerata sebesar 93,81% didukung oleh penggunaan SDM sebesar 106,58%.

b. Efisiensi Penggunaan Dana dan SDM atas Kegiatan Pengawasan dan STAR

Penggunaan dana atas kegiatan pengawasan dan STAR telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut s.d. Triwulan II Tahun 2022 yang sebesar 100,00% didukung oleh penggunaan dana sebesar 83,19%.

Penggunaan SDM atas kegiatan pengawasan dan STAR telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebesar 100,00% didukung oleh penggunaan SDM sebesar 83,23%.

Kepala Biro,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Setya Nugraha
NIP 196908091990031001